

LEGENDA, CERITA RAKYAT, DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN POLITIK PEREMPUAN JAWA

Kurniawati Hastuti Dewi

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

Diterima: 9-1-2014

Direvisi: 24-1-2014

Disetujui: 3-2-2014

ABSTRACT

This paper aims to show significance of local culture that shall not be overlooked in viewing and defining political phenomenon. This paper explores the role of legend, folktales, and languages behind the rise of female political leaders in Java. By examining political campaign of two female politician who competed in direct elections in Banyuwangi (East Java) and Kebumen (Central Java) in 2005, this paper reveals that their political rise have been eased by the local people's beliefs that they were reincarnation of prominent female figure adored in the local legend, or obtaining cultural legitimation from the Yogyakarta Court, the core of Javanese cosmology. This paper also shows that local languages in Banyuwangi and in Kebumen played significant to mediate and to create collective identity, while at the same time inserting an ideal gender norm to gain communal sympathy and to increase electability.

Keyword: *Culture, legend, folktales, languages, politics, Javanese women.*

ABSTRAK

Tulisan ini hendak memperlihatkan bahwa unsur budaya lokal berperan sangat penting dan seharusnya tidak dikesampingkan dalam melihat dan memahami fenomena politik. Tulisan ini mengelaborasi peran legenda, cerita rakyat, dan bahasa dibalik kemunculan politik perempuan di Jawa. Dengan mengamati dan meneliti strategi kampanye dua politisi perempuan Jawa yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah langsung di Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kebumen (Jawa Tengah) pada tahun 2005, tulisan ini menunjukkan bahwa kemenangan politik mereka dipermudah oleh pandangan masyarakat setempat yang melihat para politisi perempuan itu sebagai penjelmaan kembali sosok perempuan pahlawan dan dihormati dalam sejarah setempat, atau sebagai orang yang memperoleh legitimasi kultural dari Keraton Yogyakarta sebagai pusat kosmis dalam kosmologi Jawa. Tulisan ini secara jelas menunjukkan bahwa bahasa daerah di Banyuwangi dan Kebumen berperan penting sebagai media untuk membangun identitas kolektif, dan pada saat bersamaan digunakan untuk membangun persepsi mengenai norma gender ideal (yang melekat pada sosok perempuan itu) untuk menumbuhkan simpati kelompok and meningkatkan keterpilihan politik.

Kata Kunci: *Kebudayaan, legenda, cerita rakyat, bahasa, kemunculan politik perempuan Jawa.*

PENDAHULUAN

Kisah tentang penggunaan kekuatan supranatural yang tidak kasat mata dalam perebutan kekuasaan politik di Indonesia kerap ditemui, baik pada masa lampau maupun sekarang. Dalimin Ronoadmodjo, mantan pengawal pribadi Presiden Sukarno, dalam sebuah *talkshow* ('Mata Najwa' *Metro TV* 5 Juni 2013) menceritakan bahwa Sukarno menggunakan tongkat komando yang berisi pusaka dari Banten yang selalu dibawa ke mana pun ia pergi. Mistisisme Jawa juga dipakai Sukarno dalam memuluskan kebijakan politiknya. Neils Mulder (2007: 86–87) menceritakan bagaimana Sukarno meminta bantuan Nyi Roro Kidul (penguasa

Pantai Laut Selatan Jawa) dengan pasukan makhluk halus untuk menyukseskan kampanye merebut wilayah Papua Barat dan berhasil mewujudkannya; tetapi kemudian Sukarno lupa tidak membalas budi yang mengakibatkan bala tentara makhluk halus tidak dapat menemukan jalan pulang ke Laut Selatan dan terjadilah wabah tikus yang mengakibatkan kerusakan luar biasa panen rakyat Yogyakarta pada masa itu. Menurut Mulder, untuk mengatasi wabah tersebut walikota Yogyakarta menyelenggarakan pementasan wayang kulit dengan lakon *Semar Boyong* di Pantai Parangtritis agar bala tentara Nyi Roro Kidul kembali ke alamnya di Laut Selatan.

Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada presiden Republik Indonesia yang kedua, Suharto. Beberapa kajian mengungkap upaya Suharto untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun dengan menggunakan bantuan paranormal dan menjalankan ritual *kejawen*,¹ beberapa menyebut Soedjono Hoemardhani perwira Angkatan Darat yang berasal dari Solo dan sangat lekat dengan *kejawen*, sebagai guru spiritual Suharto (Retnowati Abdulgani-Knapp 2007: 96), bahkan manajemen pemerintahan Suharto kental diwarnai oleh falsafah Jawa yang mendalam (Tanri Abeng 1996: LXX). Permadi, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga seorang paranormal, menengarai bahwa semua presiden Indonesia dari Presiden Sukarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki dukun (*Republika Online* 2 April 2013).

Dalam konteks kekinian, seiring dengan meningkatnya eskalasi politik sejak era reformasi, yang ditandai dengan pelaksanaan beragam pemilihan umum dan pembenahan kelembagaan, penggunaan kekuatan supranatural dalam permainan politik semakin mengemuka. Sebagai contoh, kekuatan supranatural khususnya santet ditengarai banyak digunakan oleh para tersangka koruptor untuk menghalangi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Khaerudin, *Tribunnews.com* 9 Oktober 2013). Bahkan dalam proses politik pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya disebut Pemilu) yang sudah dilaksanakan sejak 2005 sesuai dengan UU No. 32/2004 penggunaan kekuatan supranatural sangat kental. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak 1 Juni 2005 sampai dengan 6 Agustus 2013, telah berlangsung sebanyak 954 Pemilu untuk memilih gubernur/bupati/wali kota di Indonesia (Djohan 2013). Kuantitas Pemilu yang sangat tinggi semakin memperuncing kompetisi politik sehingga para

calon kepala daerah mengerahkan berbagai cara untuk memperoleh kemenangan. Kajian Triharsono (2012) mengungkapkan bahwa para calon kepala daerah sering menggunakan jasa dukun untuk meningkatkan karisma dan pengaruh. Selain itu, juga menggunakan jasa survei politik untuk menggenjot elektabilitas politik memenangkan Pemilu.

Masih dalam rangkaian penggunaan berbagai cara untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu, tulisan ini hendak memperlihatkan penggunaan unsur budaya berupa legenda, cerita rakyat, dan bahasa di balik kemunculan politik para perempuan calon kepala daerah di Jawa. Legenda berhubungan dengan peristiwa sejarah,² diakui kebenarannya oleh masyarakat setempat, pada umumnya merupakan sejarah lisan. Legenda yang disajikan khusus menyangkut sosok perempuan dalam masyarakat lokal. Sementara itu, cerita rakyat merupakan imaji yang menggambarkan perjalanan politik perempuan Jawa untuk mendapatkan legitimasi politik dengan cara menggunakan tutur, budaya, dan kepercayaan lokal. Bahasa dimaksudkan sebagai bahasa daerah yang berasal dan berakar dari kebudayaan lokal yang dipergunakan masyarakat setempat untuk berkomunikasi, dan dalam konteks ini digunakan sebagai media kampanye politik para perempuan Jawa.

Tulisan ini difokuskan pada pengalaman dan strategi politik perempuan Jawa³ karena dua alasan. *Pertama*, alasan empiris, mengingat jumlah perempuan Jawa yang memenangkan kompetisi politik lokal, khususnya Pemilu semakin meningkat sejak Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 2005 sampai dengan 2013 (Dewi 2012). Fakta empiris meningkatnya jumlah perempuan Jawa yang memegang posisi politik kunci ini menarik untuk didalami terutama pada aspek budaya dan strategi politiknya. *Kedua*, secara teoretis kajian mengenai penggunaan

1 Menurut Koentjaraningrat (1984: 399), istilah *kejawen* berasal dari kata *Jawi* (*krami*) atau *Jawa* (*ngoko*). Menurut Koentjaraningrat, *kejawen* ini berasal dari orang-orang yang menganut *Agami Jawi* yang merasa bahwa kehidupan beragama dengan berpusat pada serangkaian upacara seperti *slametan*, sebagai yang dangkal dan mereka mencari penghayatan mengenai inti hidup dan kehidupan spiritual manusia melalui kebatinan *kejawen* yang intinya mencari kebenaran dalam batin diri sendiri.

2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> (diakses 8 Desember 2013)

3 Secara antropologis, menurut Koentjaraningrat (1985: 2), Jawa melingkupi manusia Jawa, budaya, dan bahasa Jawa yang umumnya berdomisili di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, di bagian barat (Jawa Barat) umumnya didiami oleh suku bangsa Sunda dengan bahasa Sunda.

unsur budaya semisal legenda, cerita rakyat, dan bahasa dalam memenangkan politik perempuan Jawa, masih jarang. Sejauh ini studi yang sudah relatif ‘mapan’ mengenai perempuan Jawa, banyak mengulas kiprah perempuan Jawa dalam hal ekonomi dan perdagangan (Hildred Geertz 1961; Cora Vreede-De Stuers 1960; Ann Stoler 1977); peran perempuan Jawa dalam ekonomi dan mengaitkannya dengan potensi spiritual perempuan dalam mengontrol diri (bertindak halus) sebagai salah satu kunci penguasaan kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat Jawa (Brenner 1995; Hatley 1990; Keeler 1990); perbedaan otonomi perempuan Jawa di areal pedesaan (Hull 1976); kehidupan perempuan Jawa kelas bawah di daerah perkotaan Yogyakarta (Sullivan 1994), melihat respons dan perilaku perempuan Jawa terhadap mikro kredit (Lont 2000); peran perempuan elite Jawa dalam mengendalikan bisnis keluarga khususnya rokok di Kudus (Weix 2000); melihat bagaimana jaringan keluarga dipakai untuk mendukung pekerjaan, bisnis, dan pengasuhan anak (Saptari 2000).

Sementara itu, kiprah perempuan Jawa dalam pertarungan politik dalam konteks Indonesia kontemporer, belum banyak dikupas. Padahal, secara empiris perempuan Jawa perlahan-lahan mulai terlibat aktif dan mengambil peran kunci dalam politik lokal melalui Pemilukada. Oleh karena itu, tulisan ini didedikasikan tidak sekadar untuk menunjukkan bahwa unsur budaya seperti legenda, cerita rakyat, dan bahasa memang sangat penting dan diperhitungkan di balik kemunculan politik perempuan, namun juga untuk dapat memberikan pemahaman baru mengenai keberadaan perempuan Jawa sebagai subjek yang secara aktif mampu memberi makna baru terhadap keberadaannya.

Penulis menggunakan studi kasus dua perempuan Jawa untuk memperlihatkan pertalian antara unsur kebudayaan dan politik, yaitu Ratna Ani Lestari, calon bupati yang kemudian terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 dan Rustriningsih, calon bupati yang kemudian terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Kebumen tahun 2005. Keduanya dipilih karena perjalanan politik mereka menunjukkan dinamika yang menarik, menyangkut penggunaan unsur-unsur budaya yang kentara.

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan kedua calon bupati (yang kemudian terpilih) tersebut, para narasumber yang memiliki peran penting dalam penyusunan strategi politik. Selain itu, juga mengumpulkan data/dokumen yang diperoleh selama observasi di Banyuwangi dan Kebumen pada beberapa seri penelitian lapangan tahun 2009 dan 2010.

PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT DAN KOSMOLOGI JAWA: DULU DAN KINI

Sebelum masuk ke pembahasan mengenai bagaimana legenda, cerita rakyat, dan bahasa dipakai oleh perempuan Jawa untuk memenangkan politik maka perlu dikemukakan terlebih dahulu posisi perempuan dalam masyarakat dan kosmologi Jawa. Secara umum di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, perempuan memegang kendali ekonomi yang cukup kuat sama dengan laki-laki dan hubungan di antara mereka saling melengkapi dan menunjang (*complementarity role*) (lihat misalnya Ward 1963; Errington 1990: 1–4; Reid 1988: 629–45), meskipun pada masa lalu posisi dan otonomi perempuan Jawa sangat tergantung pada kelas sosial. Perempuan yang berasal dari kalangan *priyayi* (bangsawan) justru tidak memiliki kebebasan yang luas karena mereka harus mengikuti aturan tertentu, seperti di-*pingit* paling tidak sejak usia 12 tahun, tidak boleh keluar dari lingkungan istana, belajar secara dogmatis, kemudian dijodohkan dan dinikahkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Praktik *pingitan* masih ditemukan di Jawa, paling tidak sampai dengan akhir abad ke-19.

Sementara itu, perempuan Jawa dari kelas bawah lebih memiliki otonomi dan kebebasan publik, misalnya ikut membantu keluarganya bercocok tanam, menumbuk padi, berdagang di pasar-pasar tradisional, meskipun mereka juga tidak mendapat kesempatan pendidikan karena hal tersebut masih merupakan hak istimewa kaum *priyayi*. Namun, terlepas dari kelas sosial, masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan *bilateral*, dengan pertalian kekerabatan dan waris sama-sama memperhitungkan garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan (Hildred Geertz 1961: 78). Dalam waris, perempuan dan laki-laki

memperoleh bagian yang sama sehingga sering kali pembagian warisan tidak mengikuti kaidah hukum Islam yang menggariskan laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat daripada perempuan. Hildred Geertz (1961: 79) juga menengarai bahwa “*matrifocality*” membentuk sistem kekerabatan masyarakat Jawa yang menempatkan perempuan dalam posisi kunci dengan jaringan di dalam keluarga inti yang didominasi perempuan, memiliki otoritas dan pengaruh melebihi suaminya, dan pada saat yang bersamaan menerima lebih banyak kesetiaan dan simpati. Jadi, meskipun kelas sosial menentukan derajat otonomi dan kebebasan seorang perempuan Jawa (khususnya pada masa lalu), tetapi dalam kebudayaan Jawa sebagaimana catatan (Handayani dan Novianto 2008: 41) perempuan memiliki posisi sentral karena perannya sebagai ibu dan istri yang mengontrol, meskipun di belakang layar, kendali keuangan, pengaturan rumah tangga, pendidikan anak-anak, meskipun yang muncul dan terlihat di publik adalah suami sebagai kepala keluarga.

Bagaimana kira-kira perempuan Jawa sekarang? Dalam literatur ilmiah ataupun populer, diskusi dan obrolan ringan sehari-hari ketika mulai membicarakan perempuan Jawa, sering kali muncul istilah yang sudah cukup mapan seperti perempuan Jawa sebagai *konco wingking* yang cukup mengurus urusan *dapur* (memasak), *sumur* (mencuci), dan *kasur* (melayani suami). Pada umumnya, persepsi yang muncul ketika membicarakan perempuan Jawa adalah perempuan yang lemah lembut, teratur tutur bahasanya, mengalah, sabar, dapat mengontrol perilakunya, sebagaimana ditunjukkan oleh para perempuan *priyayi* Jawa. Padahal kini, persepsi mengenai perempuan Jawa sebagai *konco wingking* dan potret perilaku perempuan Jawa seperti itu tidak sepenuhnya benar dan tepat. Hal ini disebabkan perubahan struktur sosial yang dimungkinkan oleh pembangunan ekonomi dan industri yang dipimpin Suharto sejak tahun 1970-an yang memfasilitasi kiprah publik perempuan termasuk di Jawa. Mereka secara perlahan, namun pasti kemudian mampu ‘keluar rumah’ untuk menjadi pekerja atau buruh di pabrik-pabrik yang dibangun pada saat itu. Akibatnya, semakin banyak perempuan Jawa yang memiliki peran ganda sebagai ibu dan istri di rumah, sembari bekerja di luar rumah, yang dengan sendirinya

meningkatkan kesempatan untuk berkembang, kepercayaan diri, dan otonomi terhadap dirinya sendiri. Sebagai hasilnya dapat dilihat dari kajian Yunita T. Winarto and Sri Paramita Budhi Utami (2009: 23–24) menunjukkan bahwa perempuan pedesaan di Selatan Yogyakarta secara perlahan mampu meningkatkan peran dan status mereka, dari sekedar ‘*konco wingking*’ menjadi mitra seajar suami, bahkan pada taraf tertentu dapat menjadi *panutan* dari komunitas sekitarnya, meskipun mereka tetap memosisikan suami sebagai kepala keluarga. Jadi, dapat dipahami bahwa persepsi umum mengenai perempuan Jawa sebagai yang hanya layak berperan di dalam rumah, mengikuti saja kehendak suami dan tidak memiliki otonomi atas dirinya, sekarang tidaklah tepat. Perempuan Jawa sekarang sudah mampu berperan secara aktif di luar rumah, bahkan mengambil posisi kunci di bidang ekonomi maupun politik, termasuk yang terjadi dalam Pemilu.

Selain penting memahami posisi perempuan Jawa dalam masyarakat Jawa dan perubahannya sekarang, perlu juga dipahami mengenai bagaimana sejatinya posisi perempuan Jawa dalam kosmologi Jawa. Masih dalam rangka melihat perempuan dalam kosmologi, perlu dipahami bahwa pada sekitar abad ke-13, di Asia Tenggara berkembang persepsi bahwa tubuh perempuan memiliki kekuatan membawa kesuburan, tetapi pada saat yang bersamaan ia membawa darah menstruasi yang menyebabkan perempuan dianggap memiliki potensi sakral berbahaya (*sacral danger*) bahkan pada taraf tertentu dapat menghilangkan kekuatan sebuah senjata (Andaya 2000: 234). Pandangan terhadap potensi perempuan yang memiliki kekuatan sakral, juga berkembang di Jawa. Di Jawa, khususnya para perempuan keturunan bangsawan, dipercaya memiliki kekuatan terutama yang berhubungan dengan kemampuan reproduksi dan kesuburan luar biasa (*extraordinary fertility*) (Andaya 2000: 237). Pandangan ini menunjukkan bahwa kemampuan biologis perempuan untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai seorang ibu sangat dibutuhkan bagi seorang penguasa untuk melanggengkan, mempertahankan, dan melanjutkan pengaruh dan kekuasaannya. Contoh dari pandangan ini dapat dilihat pada patung Dewi Durga di Candi Singasari Jawa Timur yang menggambarkan kesuburan dan

sifat keibuan sebagaimana digambarkan dalam Kitab *Nagarakertagama* (Andaya 2000: 234). Karya Peter Carey dan Vincent Houben (1987: 15) yang mengulas pertunjukan wayang Jawa, berkesimpulan bahwa perempuan Jawa memiliki kekuatan supranatural, dan peran penting dalam sejarah peradaban Jawa, seperti sosok Ken Dedes dengan kekuatan sakral yang mengantarkan Ken Arok menjadi Pendiri Kerajaan Tumapel (Singasari) pada awal abad ke-13.

Karya lain yang juga menunjukkan peran sentral perempuan Jawa dalam membangun peradaban Jawa adalah Ann Kumar (2000: 88–101). Ia mengelaborasi cerita, kisah, dan kronikal Jawa seperti *Babad Tanah Jawi*, *Pararaton*, dan *Serat Centini*, dan menggarisbawahi peran penting para Dewi bahkan sejak sebelum kedatangan Islam di Jawa, seperti Dewi Sri yang dipercaya sebagai penjaga dan pemelihara padi yang disebut sebagai Nawang Wulan di upacara keraton Surakarta dan Cirebon, Nyai Roro Kidul yang dipercaya sebagai penjaga dan penguasa Laut Selatan Jawa dengan kekuatan sakral yang membantu Senapati pendiri Kerajaan Mataram Yogyakarta untuk memperoleh wahyu dan kekuatan kerajaan (untuk Nyai Roro Kidul lihat juga Robert Wessing 1997: 97–120), Ratu Ken Dedes dengan potensi supranatural yang menjadi sumber penting kejayaan Raja Tumapel (Singasari) Ken Arok, dan juga cerita Tambang Raras, istri Among Raga yang memiliki bakat menyerap kekuatan supranatural karena kemampuannya yang luar biasa dalam menjalankan berbagai leluhur mistik Jawa yang kemudian dia bagikan kepada suaminya Among Raga. Elaborasi Ann Kumar terhadap cerita, kisah, dan kronikal Jawa tersebut membuatnya sampai pada kesimpulan bahwa para Dewi dan tokoh perempuan dengan kekuatan supranatural dan magis, yang mendorong para penguasa menjalin hubungan dan kerja sama dengan mereka demi kejayaan dan harmoni kerajaan, memang mewarnai mitos, tradisi, kosmologi, dan peradaban Jawa masa lalu dan kontemporer (Kumar 2000: 104).

Karya-karya yang saya kemukakan tadi, dapat memperlihatkan bagaimana perempuan Jawa khususnya yang berasal dari golongan bangsawan, sebagai istri, ibu yang melahirkan, dan nenek, dipercaya memiliki potensi kekuatan supranatural yang sangat penting untuk menun-

jang para penguasa Jawa (laki-laki) sejak masa lalu bahkan sampai saat ini. Ternyata sejarah peradaban Jawa telah menunjukkan bahwa para perempuan Jawa memegang peran penting dalam hal politik, meskipun secara tidak langsung karena mereka kemudian menjadi istri dan cikal bakal dari para penguasa-penguasa besar di tanah Jawa, khususnya pada masa kejayaan kerajaan Hindu dan Islam. Akan tetapi, kemudian peran politik perempuan Jawa ini mengalami kelumpuhan karena berbagai sebab, misalnya konteks rezim politik yang berkuasa pada masa Indonesia modern khususnya Orde Baru yang sengaja melemahkan peran perempuan Indonesia secara umum (yang di dalamnya terdapat perempuan Jawa). Pada masa itu, Ibu Tien Suharto, istri Suharto yang memang berasal dari bangsawan Jawa (Solo) memiliki peran penting untuk membentuk, menyosialisasikan, dan menjadi teladan bagaimana sebaiknya menjadi istri yang penurut, ibu yang baik, mendukung dan melayani semua kegiatan suami sebagai ‘abdi negara’. Caranya adalah dengan mengontrol peran perempuan melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi perempuan kelas bawah di pedesaan, dan Dharma Wanita untuk perempuan kelas menengah atas (lihat misalnya Julia I. Suryakusuma 1996; Madelon D. Nieuwenhuis 1987; Kathryn Robinson 2000). Dengan demikian, pelumpuhan politik setidaknya terjadi selama 32 tahun, meskipun perempuan Indonesia secara umum dan khususnya perempuan Jawa perlahan mulai kembali muncul dalam politik, melalui Pemilu. Oleh karena itu, sangat menarik melihat dan menganalisis strategi yang dimainkan para perempuan Jawa untuk meraih kemenangan politik, khususnya yang menggunakan unsur budaya, cerita rakyat, dan bahasa sebagaimana disajikan dalam bagian berikutnya.

LEGENDA DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN RATNA ANI LESTARI DI BANYUWANGI

Sebelum menjelaskan legenda dan bahasa yang berperan dalam kemunculan politik Ratna Ani Lestari maka perlu dikemukakan terlebih dahulu kondisi sosial politik di Banyuwangi. Hal ini penting dilakukan sebagai landasan berpikir untuk memahami konteks lokal dari aspek sejarah, sosiologi, dan politik di Banyuwangi.

Sosio-Kultural dan Politik Banyuwangi

Banyuwangi, merupakan satu dari 38 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, terletak di ujung timur bagian selatan provinsi ini. Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan, 217 kelurahan, dan 825 dusun pada tahun 2008 (Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2008: 25). Banyuwangi berpenduduk 1.580.441 jiwa, mayoritas Muslim diikuti dengan penganut Hindu dan Kristen di tahun 2007 (Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2005: 21, 49). Banyaknya penduduk penganut agama Hindu di Banyuwangi erat kaitannya dengan sejarah Banyuwangi yang dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Blambangan. Wilayah kekuasaan Blambangan membentang dari Probolinggo, Lumajang, Jember sampai ke timur berbatasan dengan Bali (Dwi Pranoto 2009: 22). Kerajaan Blambangan merupakan pusat agama Hindu terbesar di Jawa setelah Majapahit, yang merupakan pusat utama perkembangan Hindu-Budha di Jawa itu runtuh. Mesti diingat bahwa perkembangan peradaban Jawa kental diwarnai dengan perang perebutan wilayah kekuasaan dan berdampak pada pergantian peradaban Hindu-Budha ke Islam.

Transisi dari rezim Hindu-Budha Majapahit di Jawa Timur ke rezim Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta terjadi sejak akhir abad ke-15. Penyebaran Islam di Jawa awalnya diprakarsai oleh para penguasa lokal terutama di Pantai Utara Jawa seperti di Ngampel, Gresik, Demak, Tuban, Jepara, dan Cirebon, dimana para wali dan generasi pertama penyebaran Islam di Jawa itu muncul (Robert R. Jay 1963: 6). Penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta memutuskan untuk mengombinasikan Islam dengan kepercayaan Hindu-Budha dan menjadikannya agama negara karena sulit membendung perkembangan Islam oleh para penguasa di Pantai Utara Jawa (Robert R. Jay 1963: 9). Dalam bahasa Clifford Geertz, percampuran Islam dengan Hindu-Budha disebutnya sebagai Islam sinkretis (*syncretism Islam*) (Clifford Geertz 1960: 5, 30).

Penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta menundukkan satu per satu Kerajaan Islam di Pantai Utara Jawa, yang sudah dilakukan sejak masa Senapati sampai cucunya, yaitu Sultan Agung; dan berturut-turut mereka menaklukkan Lamongan

tahun 1617, Pasuruan tahun 1617, Tuban tahun 1619, Madura Barat tahun 1624, Surabaya tahun 1625 (Fransiscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo 1983: 169–171). Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta juga berusaha membinasakan Kerajaan Hindu yang berpotensi mengganggu kekuasaannya, termasuk Blambangan yang berada di ujung Jawa Timur sebagai satu-satunya basis Hindu yang tersisa di Jawa. Blambangan memberikan perlawanan sengit. Senapati penguasa Mataram–Yogyakarta belum berhasil menundukkan Blambangan, dan usahanya diteruskan oleh cucunya, Sultan Agung (1613–1645) yang memerlukan lima ekspedisi militer dari tahun 1625–1646, dilanjutkan oleh Amangkurat I dengan mengirimkan pasukan militer sampai tahun 1659 sehingga Blambangan dapat ditaklukkan Mataram meskipun penguasaannya tidak berlangsung lama (Fransiscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo 1983: 169–178) (Robert R. Jay. 1963: 9). Akhirnya pada masa pendudukan *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC), ibu kota Blambangan yang semula terletak di Benculuk, dipindahkan ke Banyuwangi (Dwi Pranoto 2009: 22). Hal ini juga disebutkan dalam *Babad Blambangan* khususnya *Babad Notodiningrat* yang ditulis oleh Kanjeng Raden Haryo Notodiningrat sebagai Bupati Banyuwangi pada 7 Juli 1915 (Winarsih Partaningrat Arifin 1995: 277). Selain itu, ketika Banyuwangi berada di bawah penguasaan VOC, banyak orang luar Blambangan (dari Jawa) yang didatangkan hingga tahun 1774 untuk membangun ibu kota Banyuwangi ini (Hary Priyanto 2007: 65).

Hal inilah yang menjadikan Banyuwangi sebagai daerah multikultur dan multietnis. Setidaknya ada tiga etnis utama yang ada di Banyuwangi, yaitu Osing, Mataraman, dan Madura. *Pertama*, Osing yang dianggap sebagai etnis asli Banyuwangi (*wong Blambangan*), kental menganut kultur dan kepercayaan Hindu, umumnya mereka tinggal di daerah tengah Banyuwangi, seperti di Kecamatan Rogojampi, Singjuruh, Kabat, Giri, Glagah and Songgon. Orang Osing sangat kuat mempertahankan kebudayaannya, dan memiliki karakter terbuka sebagaimana penulis rasakan ketika berinteraksi dengan mereka termasuk mengunjungi Desa Kemiren, Kecamatan Glagah pada Juli 2009. Bahkan baru-baru ini sekitar pertengahan November 2013 diadakan pesta

rakyat menyajikan 10 ribu cangkir di Desa Kemiren untuk para tetangga sekitar dan pengunjung, yang waktu itu juga dihadiri Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan (Irul Hamdani, *newsdetik.com*, 21 November 2013, diakses 18 Desember 2013). Dalam *Babad Blambangan-Notodiningrat*, disebutkan bahwa orang Osing berbeda dengan orang Jawa (Timur dan Tengah) pada umumnya seperti tubuhnya lebih besar dan kuat, percaya pada takhayul lama dan Budhisme-Jawa, meskipun untuk yang memeluk Islam dijalankan dengan semestinya, tidak lebih; mereka malu-malu, tetapi angkuh meskipun ketika menyadarkan kesalahannya akan patuh dan malas (Winarsih Partaningrat Arifin 1995: 288). Sumber lain menggambarkan masyarakat Osing itu egaliter dan tidak mengenal hierarki sosial sebagaimana masyarakat Jawa umumnya yang tecermin dari bahasa Osing yang tidak mengenal hierarki bahasa seperti di Jawa, bahkan status atau atribut sosial seseorang tidak memengaruhi pola interaksi masyarakat (Widarto dan Sunarlan 2009: 29) karena prinsip hormat tidak vertikal-hierarkis, tetapi bersifat penghargaan dalam kesetaraan (Sodaqoh Zainuddin dkk. 1996: 25) sebagaimana dikutip oleh Widarto dan Sunarlan (2009: 29).

Kedua, etnis Mataraman yang merupakan orang-orang keturunan Jawa-Hindu juga hidup di tengah, selatan, dan barat Banyuwangi seperti di Kecamatan Gambiran, Pesanggrahan, Silir Agung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, dan Tegalsari. *Ketiga*, adalah etnis Madura yang merupakan orang-orang keturunan Madura, umumnya mereka hidup di daerah pesisir di bagian timur Banyuwangi seperti di Kecamatan Muncar, Kalibaru, dan Glenmore; beberapa daerah seperti Kecamatan Cluring, Srono, dan Genteng didiami oleh Mataraman dan Osing.

Salah satu hal yang harus digarisbawahi adalah masyarakat Banyuwangi yang sangat kental dengan tradisi Hindu-Budha bercampur Islam identik dengan santet sebagai identitas budaya mereka. Padahal, menurut Suhalik (2009: 34–37), seorang budayawan Banyuwangi, stigma santet dan Banyuwangi semata-mata merupakan hasil pencitraan terhadap masyarakat Banyuwangi yang memang kental dengan perilaku yang mengandalkan kekuatan mistis dengan bantuan perantara (pawang, dukun, ulama) demi

kelancaran penyelenggaraan suatu pagelaran kesenian (gandrung) dan pesta perkawinan. Dalam masyarakat Banyuwangi sendiri, menurut Armaya (2009a: 7), santet termasuk sebagai *white magic*, sedangkan sihir dan tenung atau ilmu pengasihian termasuk *black magic*, contohnya: agar seseorang selalu berhasil di tempat kerjanya maka yang bersangkutan menggunakan ilmu pengasihian dan ini masuk kategori *black magic*; berbeda dengan seorang guru *ngaji* (ahli agama Islam) yang menolong orang sakit dengan segelas air yang sudah didoakan (*suwuk*) sehingga si sakit sembuh dan inilah yang disebut *white magic*.

Akan tetapi, dalam praktiknya, kerap terjadi kerancuan yang berujung pada pembantaian sejumlah guru *ngaji* yang dituduh sebagai tukang sihir. Banyuwangi sempat mengundang perhatian nasional karena terjadi peristiwa pembunuhan dukun santet secara massal pada bulan September–Oktober 1998, sebagai bulan-bulan penting setelah Indonesia memasuki transisi demokrasi karena lengsernya Suharto pada bulan Mei 1998. Ada kalangan yang berpendapat bahwa pembunuhan massal para dukun santet ini merupakan upaya pengalihan perhatian sesaat terhadap Suharto sebagai sosok yang baru saja lengser (Suhalik 2009: 42). Sementara itu, kalangan lain melihat fenomena itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik mistis masyarakat Osing yang kental dengan *ngelmu* santet yang dipakai secara empiris dalam politik untuk memuluskan upaya-upaya mempertahankan pengaruh dan kekuasaan (Hary Priyanto 2007: 1–5).

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari beberapa sumber (Kantor Statistik Kabupaten Banyuwangi untuk Hasil Pemilu 1987; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk Hasil Pemilu 1999; 2004; 2009), tampak bahwa pada masa Orde Baru, Golkar adalah partai politik dengan kekuatan terbesar di Banyuwangi, diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai satu-satunya partai politik Islam yang boleh hidup pada masa Orde Baru, dan posisi ketiga diduduki oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Akan tetapi, terjadi perubahan konfigurasi politik sejak era Reformasi setelah 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan partai dengan afiliasi kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), menjadi partai politik yang dominan, disusul oleh Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, kemudian diikuti oleh Golkar pada Pemilu Legislatif 1999. Situasi ini tidak berubah pada Pemilu tahun 2004, meskipun ada kemunculan Partai Demokrat yang menduduki peringkat keempat setelah Partai Golkar. Akan tetapi, pada Pemilu 2009, PDIP justru melejit menempati urutan pertama di Banyuwangi, disusul oleh Partai Demokrat, kemudian Golkar, sedangkan PKB merosot di urutan keempat. Kemerosotan PKB bisa jadi disebabkan oleh kemunculan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang memecah suara pengikut NU yang semula banyak menyalurkan aspirasinya melalui PKB. Jadi, perubahan konstelasi politik seperti itu menunjukkan bahwa Banyuwangi merupakan basis kekuatan dua golongan, yaitu kalangan santri NU sebagaimana tecermin dari kekuatan PKB, dan basis kekuatan kelompok nasionalis, seperti dapat dilihat dari kenaikan suara PDIP secara perlahan, tetapi pasti.

Ratna Ani Lestari (selanjutnya disebut Ratna), salah seorang bupati perempuan yang diangkat dalam artikel ini, berafiliasi dengan PDIP. Sebenarnya keterlibatan Ratna di PDIP lebih didorong oleh kiprah politik suaminya, Bupati Jembrana di Bali, WN. Ratna yang berasal dari keluarga campuran Madura dan Jawa, hidup dan dibesarkan di Banyuwangi, meskipun kemudian pindah ke Bali untuk mencari kerja dan kuliah di Universitas Udayana, yang mempertemukannya dengan WN merupakan salah satu dosen, dokter gigi, dan kader PDIP Jembrana. Perkenalan mereka berlanjut ke pelaminan dan Ratna menjadi istri kedua WN, yang kemudian menjadi ketua DPD PDIP Jembrana, meskipun pada tahun 2008 WN pindah ke Partai Demokrat karena PDIP tidak mendukung pencalonannya sebagai calon gubernur Bali tahun 2008. WN kemudian terpilih sebagai Bupati Jembrana selama dua periode: 2000–2005 dan 2005–2010. Sebagai istri seorang bupati, tentu dalam keseharian Ratna selalu dilingkupi dengan kegiatan politik, disebabkan ia melihat dan mendampingi suaminya berkiprah sebagai kader PDIP maupun sebagai bupati (wawancara dengan Ratna di Banyuwangi pada tanggal 29 Juli 2009). Pengaruh dan kekuasaan WN memfasilitasi terpilihnya Ratna sebagai anggota DPRD Jembrana dari PDIP (2004–2009)

yang kemudian membawa Ratna pada perjalanan politik di Banyuwangi yang akan diulas dalam bagian berikutnya.

Kemunculan Ratna: Dianggap Sebagai Sosok ‘Sri Tanjung’ dan ‘Sayu Wiwit’

Pemilukada yang dilaksanakan di Banyuwangi pada tahun 2005, membuka mata dan minat Ratna untuk menjadi bupati di tanah kelahirannya. Cara yang ditempuhnya adalah dengan menggunakan jaringan pengaruh suaminya di PDIP Jembrana yang menyebar hingga PDIP Banyuwangi. Pada waktu itu, PDIP Banyuwangi menggelar konvensi untuk memilih calon bupati dari PDIP Banyuwangi yang kemudian akan diajukan untuk memperoleh rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta. Pada konvensi itu, Ratna memperoleh dukungan suara terbanyak dari seluruh Pengurus Anak Cabang (di tingkat Kecamatan) PDIP Banyuwangi karena peran aktif suaminya WN yang melakukan lobi politik sebagai ketua tim pemenangannya (*Radar Banyuwangi* 2 Maret 2005; wawancara dengan YW ketua DPC PDIP Banyuwangi 2000–2005; 30 Juli 2009).

Akan tetapi, Ratna tidak memperoleh dukungan dari DPP PDIP, kemudian Ratna berusaha mencari “perahu” untuk melaju ke pencalonan melalui konvensi partai politik non-parlemen di Banyuwangi. Ini dimungkinkan karena hasil *Judicial Review* atas penjelasan pasal 59 UU No. 32/2004, memutuskan bahwa partai politik dan koalisi partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD setempat, tetap diperbolehkan mencalonkan calon bupati, asal gabungan suara partai politik tersebut mencapai minimal 15% dari total perolehan suara sah di DPRD setempat (*Jawa Pos* 23 Maret 2005). Ada 18 partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Banyuwangi (PNIM, PBSB, PBB, PM, PDK, PNBK, PKPI, P. PELOPOR, PPDI, PNUI, PAN, PKPB, PKS, PBR, PDS, PSI, PPD, P. PANCASILA) yang kemudian bergabung dalam Gabungan Partai-Partai Politik Non-Parlemen (GPPNP) dan melangsungkan konvensi pada tanggal 27 Maret 2005 (Gabungan Partai-Partai Politik Non-Parlemen 27 Maret 2005). Pada konvensi itu, Ratna berkompetisi dengan tiga

orang lain, dan akhirnya Ratna memenangkan konvensi dengan perolehan suara terbanyak dan resmi dicalonkan dari GPPNP sebagai calon bupati Banyuwangi pada Pemilu 2005.⁴ Kemudian, dari manakah dapat dilihat peranan legenda tertentu dibalik kemunculan RAN di dalam konvensi politik GPPNP ini?

Masyarakat Banyuwangi sangat kental dengan Legenda ‘Sri Tanjung’ yang dipercaya sebagai salah satu cerita cikal-bakal terbentuknya Banyuwangi. Sebagai sebuah legenda, ‘Sri Tanjung’ kerap dijadikan bahan perbincangan, tulisan, dan obrolan ringan dari berbagai kalangan di Banyuwangi. Penelusuran mengenai sosok ‘Sri Tanjung’ di halaman *website* resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (*Website* resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2013) dan dari sisi budayawan (Suhalik 2009: 11) memberikan gambaran yang sama sebagai sosok penting cikal bakal Banyuwangi, yaitu Sri Tanjung merupakan istri dari Patih Sidopekso yang mengabdikan pada seorang Prabu Sulahkromo yang memerintah di wilayah ujung timur Pulau Jawa (Blambangan). Kecantikan Sri Tanjung menggoda sang Prabu dan mendorongnya melakukan siasat licik mengirimkan Patih Sidopekso menjalankan tugas yang tidak mungkin dapat tercapai dan dapat berakibat kematian. Selama Patih Sidopekso pergi, Prabu Sulahkromo merayu dan memfitnah Sri Tanjung untuk menerima cintanya, tetapi tidak bergeming. Sekembalinya Patih Sidopekso, Sang Prabu memfitnah Sri Tanjung dengan mengatakan pada suaminya bahwa selama ditinggal menjalankan tugas, Sri Tanjung merayu serta bertindak serong dengan Sang Prabu Sulahkromo. Akhirnya, Patih Sidopekso menemui Sri Tanjung istrinya dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Sri Tanjung tidak mengakui fitnah dari Sang Prabu, lalu diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh hendak dibunuh oleh suaminya, Patih Sidopekso. Namun sebelum dibunuh, Sri Tanjung meminta kepada suaminya bahwa sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiiaannya, ia rela dibunuh dan jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahnya membuat air sungai berbau busuk, berarti dirinya telah berbuat serong, tetapi

4 Wawancara dengan RM Sekretaris Umum PNIM (*Partai Nasional Indonesia Marhaenisme*), 26 Juli 2009.

jika air sungai berbau harum, pertanda bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya, Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung dengan kerisnya dan jasad Sri Tanjung diceburkan ke sungai. Sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh, dan ia menjadi linglung, tanpa ia sadari kemudian dia menjerit “banyu wangi” dan jadilah Banyuwangi, yang dipercaya sebagai cikal bakal daerah dan nama Banyuwangi (*Website* resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2013; Suhalik 2009:11). Dalam pandangan Suhalik (2009: 12) legenda Sri Tanjung ini menggambarkan sosok ideal perempuan Banyuwangi sebagai sosok yang tangguh, memiliki semangat perjuangan tinggi, mempertahankan kesucian, dan harga diri. Sosok Sri Tanjung secara umum memang dikenal oleh masyarakat Banyuwangi dan dapat dilihat sebagai salah satu kebanggaan budaya masyarakat Banyuwangi ketika membicarakan perempuan.

Selain Legenda Sri Tanjung, di Banyuwangi juga dikenal Legenda Sayu Wiwit. Dalam sejarah Blambangan (Banyuwangi) terdapat peristiwa Puputan Bayu yang berlangsung sejak Agustus 1771 sampai Desember 1772 merupakan pertempuran antara orang Blambangan melawan VOC yang ada di Bayu (Dwi Pranoto 2009: 22–23). Sayu Wiwit yang dipercaya merupakan putri dari Mas Gumuk Jati (sementara di babad lain diterangkan beliau adalah putri Wong Agung Wilis), memimpin perang Puputan Bayu melawan VOC dengan gigih dan bersemangat, meskipun akhirnya Benteng Bayu dapat dikuasai oleh VOC dan Sayu Wiwit menyingkir ke lereng Gunung Raung (*yeti-chotimah.blogspot.com* 2011).

Uniknya cerita Sri Tanjung dan Sayu Wiwit ini muncul karena disebut oleh salah seorang informan yang saya temui, RM Sekretaris Partai Nasional Indonesia, Marhaein Banyuwangi, Koordinator Kecamatan tim Pemenangan Ratna, dan pelobi untuk Ratna dalam Konvensi GPPNP yang kemudian berhasil meloloskan Ratna. Dalam salah satu wawancara, saya menanyakan kepada RM alasannya mendukung Ratna sebagai calon bupati perempuan dengan mengingat bahwa Ratna secara politik sebenarnya tidak besar di Banyuwangi. Salah satu poin menarik yang dikemukakan RM adalah adanya kepercayaan

dari dirinya dan rekan-rekan budayawan bahwa kemunculan sosok Ratna di Banyuwangi pada tahun 2005, merepresentasikan kemunculan kembali sosok Sri Tanjung dan Sayu Wiwit yang sudah sangat melekat dan selama ini dirindukan kehadirannya oleh masyarakat Banyuwangi dengan harapan mampu membawa perbaikan dan perubahan. Berikut kutipan langsung dari hasil wawancara dengan RM di Banyuwangi 26 Juli 2009, sebagai berikut:

“... Ia punya kekuatan dan lagi karena Banyuwangi inikan mayoritas apa ya sedang menggali budaya ya. Orang-orang Banyuwangi ini kan lebih banyak orangnya itu eee lebih cenderung anu budaya, segala sesuatu itu mesti dihubung-hubungkan. Misalkan dengan munculnya Bu Ratna sebagai calon perempuan, Banyuwangi ini kan dalam cerita legendanya itu kan ada ... kisah Sri Tanjung itu kan ... Terus kedua di Banyuwangi pernah lahir seorang ... disemayamkan di sinilah ya pejuang perempuan ya namanya Sayu Wiwit, itu sangat dikagumi di Banyuwangi. Itu zaman Belanda, Sayu Wiwit itu pada saat masa Kerajaan Macan Putih itu, itu sangat dikenal di Banyuwangi, banyak budayawan Banyuwangi sangat tahu soal itu. Jadi dianggaplah Bu Ratna ini munculnya kembali [Sri Tanjung dan Sayu Wiwit].”

Dari pernyataan RM dapat dilihat bagaimana unsur budaya kuat memengaruhi alam bawah sadar masyarakat Banyuwangi termasuk RM dan rekan-rekan budayawan yang disebutkannya banyak menghubungkan dan menaruh harapan terhadap kemunculan Ratna sebagai representasi sosok Sri Tanjung yang tangguh, suci, dan memiliki harga diri serta sekaligus mengharapakan Ratna mampu merepresentasikan sosok kepahlawanan Sayu Wiwit yang gagah berani membela rakyat Blambangan. Pengaruh budaya, khususnya Legenda Sri Tanjung dan Sayu Wiwit dalam memengaruhi alam bawah sadar RM yang kemudian memutuskan mendukung dan menjadi salah satu tim setia pemenangan Ratna yang dianggapnya sebagai kemunculan sosok ideal perempuan Banyuwangi masa lalu itu, sebenarnya tidak mungkin terjadi jika tidak ada momentum lokal yang cukup kuat untuk dijadikan dalih melirik Ratna sebagai sosok pemimpin alternatif.

Dalam wawancara tersebut kemudian terungkap bahwa sosok Ratna dianggap sebagai orang yang paling tepat untuk dicalonkan sebagai

pemimpin Banyuwangi karena dialah satu-satunya perempuan yang muncul dalam sejarah politik modern Banyuwangi, bukan bagian dari elite politik lokal Banyuwangi yang semuanya laki-laki, termasuk empat calon bupati Banyuwangi lainnya pada tahun 2005, yang dianggap tidak ‘bersih’. Oleh karena itu, RM melihat Ratna sebagai satu-satunya alternatif figur pemimpin yang bersih dan pantas diusung oleh partai-partai politik kecil yang tidak memiliki kursi di parlemen.⁵ Pernyataan RM ini menyiratkan hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat Banyuwangi mengenai sosok pemimpin ideal perempuan yang terhubung dengan kebanggaan budaya terhadap sosok, baik Sri Tanjung maupun Sayu Wiwit. RM menekankan Ratna sebagai sosok yang bersih, erat kaitannya dengan sosok Sri Tanjung yang dalam legendanya dilihat sebagai perempuan yang rela mempertahankan kesuciannya. Jadi, ‘suci’ dalam diri Legenda Sri Tanjung di sini dapat diinterpretasikan secara empiris sebagai sosok Ratna yang dianggap relatif ‘bersih’ dibandingkan dengan calon-calon kepala daerah lainnya. Mengingat asal mula Ratna sebagai seorang ibu rumah tangga biasa dan bukan politisi murni, diharapkan mampu membawa kepemimpinan yang bersih, dapat dipercaya sebagaimana sosok Sri Tanjung, dan berani sebagaimana sosok Sayu Wiwit di masa lalu.

Anggapan bahwa Ratna merupakan kandidat perempuan yang paling tepat sebagai pemimpin masa depan Banyuwangi juga diungkapkan oleh AG, Ketua DPD *Partai Penegak Demokrasi Indonesia* (PPDI) Banyuwangi yang merupakan anggota tim kampanye Ratna, bahwa dia banyak mendengar aspirasi dari masyarakat bawah yang melihat Ratna sebagai sosok perempuan pemimpin Banyuwangi yang tepat karena kandidat bupati lain semuanya laki-laki, korup, dan sudah terlibat dalam berbagai intrik politik di Banyuwangi. Oleh karena itu, sangat tepat memilih Ratna sebagai figur alternatif.⁶ Di sini, justru semakin terasa bahwa identitas gender Ratna sebagai sosok perempuan dimaknai sebagai sosok yang akan membawa Banyuwangi ke arah perubahan yang

5 Wawancara dengan RM di Banyuwangi, 26 Juli 2009.

6 Wawancara dengan AG di Banyuwangi pada tanggal 29 Juli 2009

lebih baik dari kondisi perpolitikan dan tingkah laku elite politik Banyuwangi yang didominasi laki-laki, yang selama ini justru membuat carut-marut Banyuwangi.

Dua ilustrasi tersebut memperlihatkan bagaimana legenda Sri Tanjung dan Sayu Wiwit yang menjadi kebanggaan identitas perempuan ideal Banyuwangi pada masa lalu, secara empiris hadir dan memengaruhi alam bawah sadar masyarakat Banyuwangi termasuk dua orang yang kemudian memutuskan untuk mendukung Ratna sebagai calon bupati Banyuwangi pada Pemilu tahun 2005. Tanpa disadari mungkin Ratna tidak sengaja menggunakan legenda Sri Tanjung dan Sayu Wiwit dalam kampanye atau dalam narasi-narasi untuk menarik simpati pada awal kemunculannya, tetapi ia justru menciptakan legitimasi kultural atas kemunculannya di Banyuwangi modern. Hal ini diperoleh dari anggapan, persepsi, dan harapan masyarakat umum yang melihat Ratna sebagai satu-satunya perempuan yang maju sebagai calon bupati dalam sejarah politik modern Banyuwangi. Inilah yang secara tidak langsung berperan penting dalam memuluskan penerimaan masyarakat terhadap kemunculan politik Ratna karena dalam sejarah masyarakat Banyuwangi, perempuan tidak ditabukan bermain politik bahkan justru diharapkan memegang peran penting sebagai sosok pemimpin yang suci, mampu menjaga diri, dan berlaku sebagai pahlawan. Bagian berikutnya akan menguraikan bagaimana bahasa dipakai dalam strategi kampanye Ratna untuk membangun simpati dan solidaritas kolektif.

BAHASA UNTUK MEMBANGUN SIMPATI DAN SOLIDARITAS KOLEKTIF

Bahasa yang saya maksud adalah bahasa lisan yang banyak dituturkan oleh masyarakat Banyuwangi, yang mereka sebut ‘bahasa Banyuwangi’. Sementara itu, orang di luar Banyuwangi kerap menyebutnya sebagai ‘dialek’ Banyuwangi/Osing (atau kerap pula disebut sebagai *cara* Banyuwangi) (Armaya 2009b: 23–24). Dalam konteks *pemenangan* politik Ratna, dialek Banyuwangi/Osing ini dituturkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan kampanye Ratna khususnya melalui VCD musik. Musik VCD,

yang bersampulkan foto Ratna dan pasangannya wakil bupati GUS Y, berdurasi 7.06 menit, dan menurut keterangan WD, rekan saya yang berasal dari Banyuwangi, musik itu bercorak *kendang kempul*, dengan bahasa Osing dan bahasa Indonesia digunakan bersamaan (Penjelasan WD pada tanggal 9 Maret 2011). Beberapa cuplikan dari lirik di dalam musik itu adalah sebagai berikut:

Han sing koyo han sing uwis-uwis...saiki muncul wanito Banyuwangi, calon bupati hanggede tekade lawan visi lan misine han jelas. Utamane bebasno biaya sekolahe kanggo murid-murid SD sampe SMA. Sopo ketiban loro bebas biayane nyang Puskesmas lan nyang dokter swasta, lan sing arep ningkatno wisatane. Ayo milih Ibu Ratna, calon bupati wanito Banyuwangi, ojo lali coblosen sing nomer papat. Kadung awake kepingin seger lan sehat.

Dari lirik lagu itu tampak bagaimana cerdasnya Ratna dalam memainkan identitas gender sebagai perempuan Banyuwangi yang harus dilihat dalam figur pemimpin alternatif karena akan membawa kesejahteraan di Banyuwangi melalui program kesehatan dan pendidikan gratis, yang sebenarnya diadopsi dari program sukses suaminya, WN, selama memerintah di Kabupaten Jembrana, Bali. Selain itu, Ratna amat piawai dalam menggunakan elemen budaya, yaitu bahasa Osing, untuk menarik simpati yang luas dari masyarakat, khususnya orang Banyuwangi asli. Meskipun Ratna bukan dari Osing, tetapi dengan menggunakan bahasa Osing dalam VCD musik untuk keperluan kampanyenya, dia berusaha membangun kedekatan kolektif dengan masyarakat Osing sebagai warga asli Banyuwangi, tanpa melupakan dua etnis lainnya, yaitu Jawa dan Madura. SH, yang merupakan orang Osing mantan Bupati Banyuwangi (2000–2005) yang berusaha mencalonkan diri kembali melalui GPPNP, tetapi kalah dalam konvensi GPPNP yang memenangkan Ratna, mengatakan bahwa salah satu *deal* politiknya dengan Ratna adalah SH harus mendukung Ratna dengan cara mengenalkannya pada basis NU, yang merupakan basis sosial politik SH, bahwa Ratna juga orang Osing.⁷ Cerita di balik VCD musik kampanye memperlihatkan

⁷ Wawancara dengan SH, Orang Osing dan Bupati Banyuwangi (2000–2005), dalam wawancara dengan penulis di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Banyuwangi, 27 Juli 2009.

bagaimana bahasa daerah Osing yang merupakan simbol identitas kolektif orang Osing, digunakan oleh Ratna untuk membangun simpati sosoknya sebagai satu-satunya calon bupati perempuan yang mampu memahami dan menyelami orang Osing. Hal yang tidak jauh berbeda penulis temukan di balik kemunculan politik perempuan di Jawa Tengah, yaitu dalam diri Rustriningsih, yang pada waktu itu mencalonkan diri dalam Pemilu 2005, dan kemudian menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pemilu 2008, sebagaimana dikemukakan berikutnya.

CERITA RAKYAT DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN RUSTRININGSIH DI KEBUMEN

Sosio-Kultural dan Politik Kebumen

Kebumen merupakan satu dari 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 26 kecamatan, 11 kelurahan, dan 449 desa, dengan penduduk 1.241.437 jiwa (626.923 laki-laki dan 614.514 perempuan) pada tahun 2008 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen 2009: 5, 23, 53). Agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk dan merupakan basis NU yang kuat, tampak dari adanya 130 pesantren tradisional di Kebumen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen 2009: 88). Secara sosiologis, selain merupakan basis NU, Kebumen juga merupakan basis kelompok nasionalis atau kerap disebut sebagai *abangan*, di mana terdapat pembelahan demografis yang menarik antara daerah basis NU dan daerah dengan basis nasionalis. Informan yang saya temui di Kebumen (IS, aktivis NGO di Kebumen 27 Juli 2010) menyebutkan bahwa para penduduk dengan basis NU kuat terkonsentrasi di daerah timur Kebumen atau mereka sebut sebagai *wetan kali* (timur sungai) seperti Kecamatan Prembun, Ambal, Mirit, Kutowinangun, Kebumen, dan Alian. Sementara itu, daerah dengan basis nasionalis atau disebut juga sebagai daerah *abangan*⁸ terkonsentrasi di bagian barat Kebumen

8 *Abangan* adalah orang Muslim, yang masih tetap menjalankan praktik tradisi agama Hindu-Budha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Clifford Geertz (1960: 5). Istilah *abangan* dipakai oleh IS salah satu informan yang saya wawancarai di Kebumen untuk menyebut daerah dengan basis nasionalis di Kebumen.

atau disebut *kulon kali* (barat sungai) seperti di Kecamatan Petanahan, Pejagon, Kuwarasan, Sempor, Gombang, dan Rowokele.

‘Kali’ atau sungai yang disebut oleh informan saya, juga disebut dalam salah satu sumber tertulis (Sidik Jatmiko 2005: 143) yang juga menyebutkan pembelahan sosiologis Kebumen yang secara kasat mata dapat ditarik dari Sungai Luk Ulo yang membelah Kebumen menjadi Kebumen Barat dan Kebumen Timur dengan ‘*wetan kali*’ adalah daerah yang berada di timur Sungai Luk Ulo, seperti Kecamatan Ambal, Mirit, Kutowinangun, Kebumen, dan Alian yang merupakan basis NU, sementara ‘*kulon kali*’ adalah daerah yang berada di barat Sungai Luk Ulo, seperti Kecamatan Petanahan, Pejagon, Kuwarasan, Gombang, dan Sempor, yang merupakan basis nasionalis.

Kondisi sosiologis ini memperlihatkan bahwa Kebumen merupakan basis *abangan* dan juga basis *santri*, tercermin juga dalam konstelasi politik di Kebumen sebagaimana tergambar dalam komposisi perolehan suara partai politik di DPRD Kebumen, sejak masa Orde Baru hingga Pemilu Legislatif terakhir tahun 2009.⁹ Pada masa Orde Baru sebagaimana hasil Pemilu Legislatif tahun 1992, Golkar merupakan partai politik terbesar di Kebumen, diikuti oleh PPP, dan PDI berada di nomor tiga. Akan tetapi, sejak Pemilu legislatif pertama ketika era Reformasi mulai berlangsung, yaitu Pemilu Legislatif 1999, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri berhasil mengambil alih posisi menjadi partai politik dengan kekuatan terbesar di Kebumen, demikian juga untuk Pemilu Legislatif tahun 2004 dan 2009. PKB berhasil menduduki peringkat kedua, baik pada Pemilu 1999 maupun 2004, sama halnya dengan Golkar yang juga menduduki peringkat kedua pada Pemilu 2004. Menariknya adalah Partai Demokrat sebagai partai yang relatif baru, tetapi mampu menempati posisi kedua di Kebumen, sama halnya dengan Golkar pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Sementara itu, PPP

9 Data Hasil Pemilu 1992 diperoleh dari DPRD Dati II Kebumen (1997: 15–25). Data Hasil Pemilu 1999 diperoleh dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen (tanpa tahun: 485–89). Data Hasil Pemilu 2004 sampai dengan 2009 dari Sekretaris DPRD Kebumen, “Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2004–2009” and “Daftar Anggota DPRD Masa Bakti 2009–2014”.

sebagai partai politik tertua yang berafiliasi dekat dengan NU, selalu berhasil menempati posisi ketiga di Kebumen pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Konstelasi politik seperti ini menunjukkan karakteristik sosial politik Kebumen yang merupakan basis nasionalis sebagaimana tecermin dari kekuatan PDIP yang berturut-turut memenangkan Pemilu sejak 1999, 2004, dan 2009. Secara politik, Kebumen juga merupakan basis *santri* NU yang kuat karena, baik PKB maupun PPP yang berafiliasi dekat dengan NU selalu berhasil menempati posisi kedua dan ketiga di Kebumen pasca Orde Baru. Karakteristik sosial-politik Kebumen sebagai basis *abangan* dan *santri*, nantinya dijadikan pertimbangan penting oleh Rustriningsih (selanjutnya disebut Rustri) ketika menyusun strategi politik untuk kemenangan Pemilu Kabupaten Kebumen tahun 2005.

Dalam konteks peran unsur budaya dalam kemenangan politik Rustri, observasi saya di Kebumen memperlihatkan bagaimana cerita rakyat yang melekat dengan budaya lokal dipergunakan sebagai salah satu cara untuk menguatkan legitimasi kultural kemunculan Rustri dalam politik di Kebumen sebagaimana diuraikan berikutnya.

LEGITIMASI KULTURAL KEMUNCULAN RUSTRI: 'WAHYU' DARI KERATON

Sebenarnya Rustri memang berasal dari keluarga yang sudah terbiasa dengan kegiatan politik. Rustri memang besar di Kecamatan Gombang, salah satu daerah yang merupakan basis kuat dari kelompok nasionalis di Kebumen. Ayah Rustri adalah bendahara Partai Nasionalis Indonesia Kebumen, yang kemudian berubah menjadi PDI, dan kemudian PDIP (di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri sejak 1997). Ayah Rustri tetap menjadi bendahara PDI Kebumen sampai dengan tahun 1987. Sejak kecil Rustri sudah terbiasa melakukan diskusi-diskusi politik dengan ayahnya. Awal keterlibatan Rustri secara formal adalah selepas dia menyelesaikan sarjananya di salah satu perguruan negeri di Jawa Tengah, dan memperoleh rekomendasi dari teman ayahnya, dan Rustri siap menjadi wakil sekretaris PDI Kebumen pada tahun 1993.

Mesti diingat bahwa dalam konteks waktu itu, masih sangat jarang ditemukan perempuan yang aktif dalam politik karena dianggap sebagai arena yang keras. Di samping itu, PDI kerap diasosiasikan sebagai partai orang miskin dan *wong cilik* (wawancara dengan Rustri di Semarang pada tanggal 3 Februari 2010). Dalam perkembangannya, Rustri terbiasa terlibat langsung dalam politik karena rumah mereka di Gombang sering dijadikan basis perjuangan PDI yang pada masa Orde Baru memang menghadapi perlawanan dan intimidasi sengit dari Golkar sebagai partai politik di bawah kendali Suharto sebagai penguasa rezim Orde Baru yang waktu itu berusaha memecah belah PDI. Bagaimanapun Rustri tetap membuktikan kepiawaian dan integritasnya di PDI ketika pada tahun 1996 Rustri terpilih menjadi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Kebumen dan secara berani melakukan demonstrasi guna mempertahankan Megawati Sukarnoputri melawan Suryadi yang memang dipasang oleh Suharto untuk memecah belah PDI pada Kongres tahun 1996. Meskipun akhirnya Suharto hanya mengakui PDI yang dipimpin Suryadi, Rustri tetap mendukung Megawati dan membangun loyalitas pendukung Megawati dengan membuka banyak Pengurus Anak Cabang (PAC) di berbagai kecamatan di Kebumen sepanjang tahun 1997. Hal ini semua membuatnya terkenal sebagai figur pemberani dan kerap ditangkap aparat meskipun kemudian dibebaskan kembali (*Seputar Indonesia* 24 Juni 2008). Hal ini membuat PDI-Pro Megawati Kebumen, bersama dengan Pro Mega Magelang dan Semarang terkenal sebagai *segitiga emas* daerah basis PDI-Pro Megawati.¹⁰

Keadaan menjadi berbalik ketika rezim Orde Baru tumbang dan era Reformasi bergulir sejak 1998; PDIP-Megawati pada Pemilu Legislatif tahun 1999 memperoleh suara yang signifikan. Secara perlahan namun pasti, pamor dan pengaruh Rustri naik di Kebumen. Akan tetapi, muncul permasalahan karena para kaum tua di dalam PDI Pro-Mega PDI Kebumen tidak

10 Wawancara dengan HR, sekretaris PDI Pro Megawati di Kebumen (1998–1999), sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kebumen (1999–2004), ketua Fraksi PDIP di DPRD Kebumen (2004–2009), di Kebumen 28 Juli 2010.

sepenuhnya suka dengan kemunculan Rustri.¹¹ Hal ini dikonfirmasi dalam salah satu wawancara saya dengan CA, seorang wartawan koresponden media cetak *Wawasan* (yang pada waktu itu berafiliasi kuat dengan PDI), yang juga rekan dekat K.H. Nashiruddin Al-Mansyur, seorang kyai NU yang menjadi pendamping Rustri sebagai calon wakil bupati Kebumen. CA menceritakan bahwa di tengah kegaduhan dan kegonjangan penolakan kaum tua PDI Pro Mega Kebumen, muncul dan berkembang cerita yang lekat dengan unsur budaya yang mengokohkan Rustri sebagai pemimpin baru. CA mengatakan bahwa Rustri adalah sosok pemimpin perempuan untuk Kebumen yang sudah memperoleh restu dan wahyu dari penguasa Yogyakarta. Berikut adalah kutipan wawancaranya dengan saya:

“Sebelum kerusuhan di Kebumen/Gombang... itu konon ada juru kunci dari Jogja. Itu heboh katanya Rustri dapat wangsit dari Imogiri...Ini lho ceritanya begini, dia juru kunci [makam] Wonogiri habis Selasan Kliwon itu ada *lorotan caos dahar* [sesajian] yang dibawa ke Rustri. Lalu dia [pergi] ke kantor PDI [Pro Mega] yang baru di terminal lama, dia bawa bungkusan dengan *mori* [kain kafan putih]... Lalu di Stasiun dia tanya yang namanya Rustri mana? Lalu dia nunggu Rustri di kantor PDI. Begitu Rustri datang, dia *laku dodog* [jalan sembari duduk], dan menyembah Rustriningsih, dan menyerahkan bungkusan isi pisang, telur, dan kembang-kembang untuk ditanam di rumah. Lalu itu saya tulis di koran [*Wawasan*]...” (Wawancara dengan CA, koresponden *Wawasan* di Kebumen pada tanggal 27 Juli 2010).

Dalam wawancara berikutnya dengan rekan Rustri, AP, kaum muda yang tergabung dalam tim sembilan di PDI Pro Mega Kebumen, mengatakan bahwa cerita rakyat yang berkembang di mana Rustri merupakan sosok ‘terpilih’ menerima wahyu Keraton, sebenarnya adalah rekayasa belaka (wawancara dengan AP di Kebumen pada tanggal 28 Juli 2010). Meskipun demikian, AP lebih jauh mengatakan bahwa cerita rakyat yang dibalut dengan unsur budaya ini begitu kuat dipercaya, dan menyebabkan Rustri memperoleh legitimasi kultural dari para kaum tua. Pada gilirannya, mereka kemudian mendorong dan

menyetujui kemunculan politik Rustri sebagai pemimpin politik perempuan di PDI Kebumen.

Cerita rakyat mengenai Rustri telah menerima wahyu ‘kepemimpinan’ bersumber dari Keraton Yogyakarta, terlepas itu rekaan atau benar, telah menggambarkan bagaimana pandangan dunia Jawa mengenai bagaimana seorang pemimpin itu ‘lahir’ karena memiliki sumber legitimasi kultural yang jelas dari pusat semesta (kosmos). Dalam mistik Jawa, para raja, dan istana-istananya dipandang sebagai wadah potensi kosmis, di mana kekuasaan duniawinya mencerminkan mandat supranatural karena menerima ‘*wahyu*’/‘*wangsit*’ sebagai pertanda dari kepribadian mereka yang memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat (Niels Mulder 2001: 39–40). Dalam kosmologi Jawa, dipercaya bahwa semua peristiwa tidak terjadi secara kebetulan. Peristiwa itu saling berhubungan, tidak sembarangan, dan sebagai suatu keseluruhan, tunduk pada takdir dan bukan kemauan sendiri; takdir ini dikenal sebagai prinsip kepastian, dan hasil dari takdir adalah kebenaran yang diterjemahkan sebagai manifestasi dan ‘kebetulan’ (Niels Mulder 2001: 123). Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa cerita dibalik kemunculan Rustri, terlepas dari benar atau rekayasa, menunjukkan bahwa kosmologi Jawa tentang konsep pemimpin sangat kuat mempengaruhi masyarakat Kebumen khususnya kelompok *abangan* yang merupakan basis sosial Rustri.

Dalam cerita dibalik kemunculan Rustri untuk memperoleh restu kaum tua, terdapat unsur-unsur mistik Jawa; bahwa Rustri memperoleh wahyu dari Keraton Yogyakarta, yang dalam kosmologi Jawa dipercaya sebagai salah satu pusat kosmis. Cerita itu membangun imej bahwa Rustri muncul sebagai sosok pemimpin baru di Kebumen, tidak atas kemauan sendiri, tetapi atas takdir alam karena memperoleh wahyu dari Keraton Yogyakarta. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rustri sudah memperoleh legitimasi kultural dari pusat kosmis, yaitu Keraton Yogyakarta. Dengan demikian, kemunculan Rustri harus didukung karena dialah memang yang sudah ditakdirkan terpilih menjadi pemimpin baru di Kebumen. Dampak dari bergulirnya cerita itu adalah Rustri semakin mudah memperoleh restu dan penerimaan dari kaum tua dan semakin memuluskan langkahnya untuk memimpin Kebumen. Rustri kemudian muncul

11 Wawancara dengan AP, mantan anggota tim 9 PDI Pro Mega Kebumen, 28 Juli 2010.

sebagai sosok pemimpin baru di Kebumen, yaitu menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen tahun 1999, kemudian terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 dari PDIP, yang mengantarkannya pada pemilihan kepala daerah di Kebumen pada tahun 2000, dengan mekanisme pemilihan pada waktu itu masih di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, Rustri terpilih menjadi bupati perempuan pertama di Kebumen pada tahun (2000–2005), yang kembali terpilih sebagai Bupati Kebumen (2005–2010) karena memenangkan pemilihan kepala daerah langsung di Kebumen pada tahun 2005.

Rustri menjadi sangat tenar karena merupakan bupati perempuan pertama dalam sejarah politik lokal di Indonesia yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah langsung ketika pertama kali dilaksanakan tahun 2005, sesuai dengan UU No. 32/2004. Banyak orang membicarakan keberanian dan kemunculan Rustri sebagai bintang baru dalam politik lokal di Indonesia karena memang pada waktu itu masih sangat sulit mencari sosok bupati perempuan yang berani dan konsisten. Uniknyanya, untuk menguatkan dan menggambarkan kemunculan sosok Rustri, banyak orang termasuk wartawan media cetak kerap menyebut Rustri sebagai ‘srikandi’ dari Jawa (*tokohindonesia.com*, diakses 14 Oktober 2009). Srikandi dalam dunia pewayangan Jawa merupakan sosok prajurit wanita yang berani dan kerap memimpin pertempuran. Alhasil, di sini dapat kita lihat bagaimana unsur kebudayaan Jawa, khususnya dalam dunia pewayangan mewarnai pola pikir para pengagum Rustri, yang melihatnya sebagai sosok pemimpin perempuan gagah berani dan tampil sebagai pemimpin Kebumen, sama halnya dengan Srikandi dalam pewayangan Jawa.

GENDER DALAM BAHASA UNTUK MEMBANGUN SOLIDARITAS KOLEKTIF

Gender dengan menggunakan media bahasa lokal dipergunakan oleh Rustri dalam perjalanan karier politiknya. Sukses sebagai Bupati Kebumen dua periode (2000–2005) dan (2005–2010), Rustri kemudian semakin melaju ke kancah yang lebih tinggi. Pada pemilihan gubernur untuk Provinsi

Jawa Tengah tahun 2008, Rustri diinstruksikan oleh ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi BW sebagai calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan. Rustri menjadi satu-satunya calon wakil gubernur perempuan di antara lima pasangan calon gubernur dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2008. Menariknya, baik BW sebagai calon gubernur dari PDIP yang merupakan purnawirawan TNI AD memiliki tim kampanye sendiri yang memanfaatkan jaringan alumni militer. Sementara itu, Rustri juga membentuk tim pemenang yang terdiri atas para kader PDI Perjuangan dan relawan yang bergerak di seluruh daerah Jawa Tengah, termasuk di daerah asal Rustri di Kebumen.

Unsur kebudayaan yang mengemuka dan hendak diulas dalam bagian ini adalah bagaimana Rustri secara cerdas menggunakan dan memainkan gender dalam bahasa lokal untuk menarik simpati dan membangun solidaritas kolektif sebagai warga Kebumen. Perlu diingat kembali bahwa Rustri mempunyai latar belakang Jawa yang kuat. Kebudayaan Jawa mempercayai bahwa *wanita sejati* adalah perempuan yang mampu menjalankan peran sebagai ibu dan istri dengan baik di rumah (Handayani dan Novianto 2008: 143). Dalam pandangan Jawa, untuk menjadi wanita sejati, perempuan harus menikah karena menikah merupakan pintu untuk menjadi istri dan ibu yang seutuhnya. Dalam kasus Rustri, sejak tahun 2004 sekembalinya menunaikan ibadah haji di Mekah, Rustri memakai kerudung dan busana muslimah dalam kesehariannya dan kemudian ia menikah. Tahun 2004, bagi Rustri menjadi tahun yang sangat berarti secara pribadi dan secara politik. Dia menjadi lebih berpenampilan ‘Islami’ dengan memakai kerudung, meskipun dia tergabung dalam PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis dan pada tahun yang sama ia menjadi seorang istri yang menandakan fase baru seorang perempuan Jawa yang matang, disusul kemudian memiliki anak. Oleh karena itu, lengkaplah Rustri sebagai sosok politisi perempuan yang utuh, sebagai “wanita sejati” yang menjadi istri dan ibu. Dengan demikian, Rustri telah memenuhi norma gender ideal perempuan dalam pandangan Jawa. Menariknya, sebagai politisi perempuan yang berani dan aktif, Rustri tidak menentang norma

gender ideal Jawa, tetapi tetap tunduk meskipun memainkan peran secara aktif dalam narasi kampanye untuk menyukseskan pencalonannya bersama BW dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2008. Hal ini terlihat dalam kampanye Pemilu Jawa Tengah 2008 di Kebumen, sebagaimana dikemukakan salah satu informan SW wakil ketua PKB Kebumen (2001–2005) sebagai berikut:

“Pemilihan gubernur [Pemilu Gubernur Jawa Tengah tahun 2008] malah kelihatan muncul padahal tidak ada sanggahan yang cukup kuat. Seperti di Banyumas yang dipilih ya yang ada kerudungnya. Di sini [Kabupaten Kebumen] di beberapa daerah pedesaan ada [slogan kampanye] yaitu *milih biyunge dewek, wonge dewek ...*” (SW wakil ketua PKB Kebumen (2001–2005), 28 Juli 2010).

Melalui slogan kampanye yang digunakan di Kebumen pada Pemilu Gubernur Jawa Tengah tahun 2008, “*milih biyunge dewek, wonge dewek*” sebagaimana dikemukakan SW dalam kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Rustri dengan cerdas menggunakan bahasa lokal Kebumen *ngapak-ngapak*, yakni ‘*biyung*’ yang dalam bahasa Indonesia berarti ibu, dan ‘*wonge dewek*’ yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘orang sendiri’. Dengan memilih menggunakan kata ‘*biyung*’ daripada kata ‘ibu’, Rustri berusaha membangun keterikatan sosial kolektif dengan masyarakat Kebumen di mana dia berasal dan memiliki akar komunitas yang kuat, yang sekaligus juga memperkuat dan menegaskan slogan kedua ‘*wonge dewek*’ atau orang Kebumen asli. Kata ‘*biyung*’ juga tidak semata-mata hanya sebuah kata, tetapi dituturkan karena memiliki makna dalam menggambarkan sosok Rustri saat itu. Rustri yang kala itu sudah menikah dan memiliki anak, tidak saja merepresentasikan dirinya sudah menjadi ‘wanita sejati’ dalam pandangan masyarakat Jawa, tetapi juga untuk memperluas makna ‘*biyung*’ bahwa Rustri juga menjadi ‘ibu’ yang berasal dari masyarakat Kebumen sendiri dan mengayomi mereka layaknya seorang ibu pada anaknya. Jadi, ‘*biyung*’ yang dipakai Rustri menggambarkan norma gender ideal mengenai perempuan sejati dalam masyarakat Jawa, khususnya dalam konteks lokal politik di Kebumen. Interpretasi terhadap penggunaan kata ‘*biyung*’

dalam slogan kampanye Rustri seperti itu, diperkuat dengan kampanye Rustri di tempat lain. Dalam salah satu kampanyenya sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah, di Kajan Ibu kota Kabupaten Pekalongan pada Juni 2008, Rustri mengatakan bahwa sudah saatnya perempuan menjadi pemimpin dan bahwa kesuksesan dirinya di Kebumen menunjukkan bahwa perempuan dapat sejajar dengan laki-laki tanpa melupakan kodratnya (*Suara Merdeka*, 13 Juni 2008). Jadi, tampak betul bagaimana Rustri memegang teguh kodratnya, menjadi sosok perempuan sejati, tetapi aktif berpolitik, dan sekaligus memperkuat kampanye dirinya sebagai ‘*biyung*’ atau ‘ibu’ bagi masyarakat Kebumen dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, yang harus didukung dalam Pemilu Jawa Tengah kala itu.

PENUTUP

Persaingan yang sengit dan ketat dalam Pemilu memaksa setiap calon untuk mengerahkan segala cara untuk meningkatkan elektabilitas politik, termasuk penggunaan bantuan yang terukur seperti survei politik, maupun yang tidak kasat mata berupa kekuatan supranatural. Akan tetapi, di luar hal itu berbagai temuan lapangan yang diungkap dalam tulisan ini membuka mata dan menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan seperti legenda dan cerita rakyat mengenai sosok perempuan yang berpengaruh dalam sejarah daerah itu, memengaruhi alam bawah sadar masyarakat lokal yang kemudian secara tidak langsung mendorong dan memuluskan kemunculan para calon bupati perempuan ini.

Dalam perkembangannya, unsur lain seperti gender secara sengaja dimainkan dengan menggunakan media bahasa lokal dalam kampanye politik Ratna dan Rustri, di Banyuwangi dan Kebumen. Kemunculan Ratna dan Rustri dalam politik lokal kontemporer Indonesia sebenarnya membuka mata kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban komunitas tertentu pada masa lalu, perempuan memiliki peran dan posisi publik yang sentral, seperti dalam sosok Sri Tanjung dan Sayu Wiwit dan juga Srikandi. Hanya saja ada semacam jeda antara konstruksi berpikir yang memperlihatkan perempuan Jawa memiliki peran dan posisi kuat dalam kepemimpinan publik pada masa lalu

dengan perkembangan peran dan posisi perempuan Jawa pada fase Indonesia modern khususnya pada masa Order Baru. Mempertimbangkan hal ini, sebenarnya peran legenda, cerita rakyat, dan bahasa lokal dalam kemunculan dan kemenangan politik perempuan Jawa juga merupakan ekspresi kebangkitan kembali spirit asli komunitas tertentu, dalam hal ini Jawa yang memang pada masa lampau menaruh hormat dan apresiasi tinggi terhadap sosok, peran, dan kepemimpinan perempuan sebagai istri, ibu, dan pemimpin publik yang seutuhnya. Jadi, kemunculan Ratna dan Rustri dalam politik lokal di Banyuwangi dan Kebumen, tidak tepat jika semata-mata dilihat sebagai sebuah peristiwa politik belaka. Akan tetapi, itu harus dilihat sebagai sebuah momentum penting dari proses keberlanjutan budaya dan spirit lokal yang sempat terputus oleh penetrasi politik dalam konstruksi negara Indonesia modern.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- A. Brenner, Suzanna. 1995. "Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-control". Aihwa Ong and Michael G. Peletz (Ed.). *Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Abeng, Tanri. 1996. "Manajemen Soeharto: Suatu Fenomena (Catatan Seorang Praktisi)". Riant Nugroho Djojonegoro (Ed.). *Manajemen Presiden Soeharto (Penuturan 17 Menteri)*. Jakarta: Yayasan Bina Generasi Bangsa.
- Abdulgani-Knapp, Retnowati. 2007. *Soeharto The Life and Legacy of Indonesia's Second President*. Jakarta: Penerbit Kata.
- Andaya, Barbara Watson. 2000. "Delineating Female Space: Seclusion and the State in Pre-Modern Island Southeast Asia". Barbara Watson Andaya (Ed.). *Women, Gender and History in Early Modern Southeast Asia*. Hawaii at Manoa: Center for Southeast Asian Studies.
- Arifin, Winarsih Partaningrat. 1995. *Naskah dan Dokumen Nusantara Seri X: Babad Blambangan*. Yogyakarta: Kerja Sama Ecole Francaise d'Extreme-Orient dengan Benteng Budaya.
- Armaya. 2009a. "Istilah Santet Perlu Dipertanyakan". *Santet: Sejumlah Tulisan*. Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2009. *Kebumen Dalam Angka 2008*. Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.
- Bappeda Kabupaten Banyuwangi. 2005. *Selayang Pandang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005*. Banyuwangi: Bappeda Kabupaten Banyuwangi.
- Carey, Peter, and Houben, Vincent. 1987. "Spirited Srikandhis and Sly Sumbadras: The Social, Political and Economic Role of Women at the Central Javanese Courts in the 18th and early 19th Centuries". Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehof (Ed.). *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*. The Netherlands: Foris Publications.
- Errington, Shelly. 1990. "Recasting Sex, Gender, and Power: A Theoretical and Regional Overview". Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington (Ed.). *Power and Differences: Gender in Island Southeast Asia*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Gabungan Partai-Partai Politik Non Parlemen. 2005. "Kontrak Politik Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banyuwangi Tahun 2005–2010 dengan Gabungan Partai-Partai Politik Non Parlemen". 27 Maret.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. New York: Free Press.
- Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. United States of America: The Free Press of Glencoe Inc.
- Handayani, Christian S. dan Novianto, Ardhian. 2008. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Hatley, Barbara. 1990. "Theatrical Imagery and Gender Ideology in Java". Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington (Ed.). *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Jay, Robert R. 1963. *Religion and Politics in Rural Central Java: Cultural Report Series No.12*. USA: Southeast Asian Studies, Yale University.
- Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1987*. 1987. Banyuwangi: Kantor Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- Keeler, Ward. "Speaking Gender in Java". Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington (Ed.). *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa: Seri Etnografi Indonesia No. 2*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat, R.M. 1957. *A Preliminary Description of The Javanese Kinship System, Cultural Report Series*. Yale University: Southeast Asia Studies.

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. "Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 1999–2004", "Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2004–2009", "Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2009–2014".
- Kumar, Ann. 2000. "Imagining Women in Javanese Religion: Goddess, Ascetes, Queens, Consort, Wives". Barbara Watson Andaya (Ed.). *Other Pasts: Women, Gender, and History in Early Modern Southeast Asia*, 88–101. Hawai'i, Manoa: Centre for Southeast Asian Studies, University of Hawai'i.
- Memori Pengabdian DPRD Kabupaten Dati II Kebumen Masa Bhakti Tahun 1992–1997. 1997. Kebumen: DPRD Dati II Kebumen, 1997.
- Mulder, Niels. 2007. *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Nieuwenhuis, Madelon D. 1987. "Ibuisism And Priyazization: Path to Power?" Elsbeth Locher-Scholten and Anke Niehof (Ed.). *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*. The Netherlands: Foris Publications.
- Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen. Tanpa Tahun. *Buku Lampiran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Dati II Kebumen*. Kebumen: Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen.
- Robinson, Kathryn. 2000. "Indonesian women—from Orde Baru to Reformasi". Louise Edwards and Mina Roces (Ed.). *Women in Asia: Tradition, Modernity, and Globalisation*. Australia: Allen and Unwin.
- Saptari, Ratna. 2000. "Networks of Reproduction Among Cigarette Factory Women in East Java". Juliette Koning, Marleen Noltén, Janet Rodenburg, Ratna Saptari (Ed.). *Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices*. Great Britain: Curzon Press.
- Sekretaris DPRD Kebumen. "Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2004–2009" dan "Daftar Anggota DPRD Masa Bakti 2009–2014".
- Suhalik. 2009. "Santet dalam Perspektif Antropologi Budaya". *Santet: Sejumlah Tulisan Banyuwangi*: Pusat Studi Budaya Banyuwangi.
- Sullivan, Norma. 1994. *Masters and Managers: A Study of Gender Relations in Urban Java*. NSW, Australia: Allen and Unwin.
- Suryakusuma, Julia I. 1996. "The State and Sexuality in New Order Indonesia". Laurie J. Sears (Ed.). *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham and London: Duke University Press.
- Vreede-De Stuers, Cora. 1960. *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements*. France: Mouton & Co.
- Ward, Barbara. 1963. *Women in the New Asia: The Changing Social Roles of Men and Women in South and South-East Asia*. Netherlands: Unesco.
- Weix, G.G. 2000. "Hidden Managers at Home: Elite Javanese Women Running New Order Family Firms". Juliette Koning, Marleen Noltén, Janet Rodenburg, Ratna Saptari (Ed.). *Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices*. Great Britain: Curzon Press.

Jurnal

- Armaya. 2009b. "Pertumbuhan Kesusastraan Berbahasa Daerah di Kabupaten Banyuwangi". *Lembaran Kebudayaan Jurnal Seni dan Budaya*, No. 3 (Agustus).
- Dewi, Kurniawati Hastuti. 2012. "Female Leadership and Democratization in Local Politics since 2005: Trend, Prospect, and Reflection in Indonesia". *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38, No. 2 (December).
- Koentjaraningrat. 1962. Reviewed Work Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*, *American Anthropologist New Series* 64, No. 4 (Aug): 874, <http://www.jstor.org/stable/667817> (diakses 9 November 2008).
- Lont, Hotze. 2000. "More Money, More Autonomy?: Women And Credit in A Javanese Urban Community". *Indonesia* 70 (October).
- Pranoto, Dwi. 2009. "Petaka Blambangan: Puputan Bayu, Minakjinggo Sampai Genjer-Genjer", *Lembaran Kebudayaan Jurnal Seni dan Budaya*, No. 1 (Juni): 22–23.
- Reid, Anthony. 1988. "Females Roles in Pre-Colonial Southeast Asia". *Modern Asian Studies* 22, No. 3.
- Stoler, Ann. 1977. "Class Structure and Female Autonomy in Rural Java". *Signs* 13, No.1 (Autumn): 76–8, 78–84, <http://www.jstor.org/stable/3173080> (diakses 14 Desember 2008).
- Trihartono, Agus. 2012. *Kyoto Review of Southeast Asia, Issues 12: The Living and the Dead* (October).
- Wessing, Robert. 1997. "Nyai Roro Kidul in Puger: Local Applications of Myth". *Archipel* Vol. 53.
- Widarto dan Sunarlan. 2009. "Pemekaran Kabupaten Banyuwangi: Tinjauan Kritis Pemekaran dari Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya". *Lembaran Kebudayaan Jurnal Seni dan Budaya*, No. 2 (Juli): 29.

Thesis

- Jatmiko, Sidik. 2005. "Kiai dan Politik Lokal: Studi Kasus Reposisi Politik Kiai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi di Era Reformasi" (Ph.D. thesis, Gadjah Mada University).
- Tjiptoatmodjo, Fransiscus Assisi Sutjipto. 1983. "Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII Sampai Medio Abad XIX)" (Ph.D. thesis, Gadjah Mada University, Yogyakarta).

Laporan Penelitian

- Priyanto, Hary. 2007. "Komparasi Politik dan Santet pada Suku Using". Laporan Penelitian, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 15 Mei.

Makalah

- Djohan, Djohermansyah. 2013. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Dinamika dan Ekses Pilkada Langsung". Makalah dipresentasikan dalam Diskusi Terfokus, Kelompok Kajian Pemilukada Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 26 Agustus.
- Hull, Valerie J. 1976. "Women in Java's Rural Middle Class: Progress or Regress?" *Working Paper Series*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Winarto, Yunita T., and Budhi Utami, Sri Paramita. 2009. "The Persisting and Changing "Family" in Java: Empowering Women, Changing Power Relations?" Paper Presented in the International Workshop on "The Making of East Asia: From both Macro and Micro Perspectives" of the JSPS-NRCT 2008 CORE University Exchange Program at the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan, 23–24 Februari.

Sumber On Line/Media Cetak

- Dalimin Ronoadmodjo, mantan pengawal pribadi Sukarno, dalam Program Mata Najwa "Tentang Sukarno" Metro TV, 5 Juni 2013, <http://www.youtube.com/watch?v=FmlQAtu3vfA> (diakses 3 Desember 2013)

"Mengenal Wakil Gubernur Jateng Terpilih Rustring-sih: Si Pendiam yang Konsisten Jalani Dunia Politik". *Seputar Indonesia*, 24 Juni 2008.

"Partai Gurem Bisa Usung Calon". *Jawa Pos*, 23 Maret 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> (diakses 8 Desember 2013)

Republika Online. 2013. "RUU Santet Jadi UU, Presiden Bisa Terjerat". *Republika.co.id*, Selasa, 2 April 2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmlco-permadi-ruu-santet-jadi-uu-presiden-bisa-terjerat> (diakses 3 Desember 2013).

Khaerudin. 2013. "Politisi Cantik yang Ingin Menyantet KPK, Kini Menghuni Penjara," *Tribunnews.com*, Rabu, 9 Oktober 2013, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/09/politisi-cantik-yang-ingin-menyantet-kpk-kini-menghuni-penjara> (diakses 3 Desember 2013).

"Ratna Kantongi 900 Suara". *Radar Banyuwangi*, 2 Maret 2005

"Rustri Ajak Perempuan Bangkit". *Suara Merdeka*, 13 Juni 2008.

Tokohindonesia.com. 2009. "Kini, Srikandi Jawa Tengah". www.tokohindonesia.com (diakses 14 Oktober 2009).

Irul Hamdani. 2013. "Uniknya Pesta 10.000 Cangkir Kopi ala Masyarakat Using Kemiren". <http://news.detik.com/surabaya/read/2013/11/21/084943/2419167/475/uniknya-pesta-10000-cangkir-kopi-ala-masyarakat-using-kemiren> (diakses 18 Desember 2013).

Website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2013. <http://www.banyuwangikab.go.id/profil/sejarah-singkat.html> (diakses 19 Desember 2013)

Yeti-chotimah.blogspot.com. 2011. "Alam, Sejarah, Seni, dan Budaya Banyuwangi". <http://yeti-chotimah.blogspot.com/2011/10/sejarah-banyuwangi.html> (diakses 19 Desember 2013).